



RENJA

(RENCANA KERJA)

TAHUN 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat Rencana Kinerja yang ingin dicapai oleh Bappeda di Tahun 2026. Rencana Kerja menggambarkan Target Kinerja Tahun 2026 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 8 September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tabanan,

I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos.,m.Si.,CGCAE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
4.1 Rumusan Rencana Kerja.....	38
BAB V PENUTUP.....	42
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	42
5.2. Rencana Tindak lanjut.....	43

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Bappeda Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 wajib dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tahun 2026 merupakan Lima Tahun Kelima arah pembangunan Daerah dalam RPJPD yang akan dituangkan kedalam RPJMD 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Tabanan 2025-2029, Bappeda Kabupaten Tabanan masuk dalam misi kelima yaitu Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, Serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi Dan Berkeadaban Bappeda Kabupaten Tabanan menyusun Renja Tahun 2026 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Bappeda Kabupaten Tabanan 2026 disusun secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan kajian terhadap kondisi eksisting Bappeda,

evaluasi pelaksanaan Renja

Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Pencapaian Renstra Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah :

- a. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan.
- b. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2026 serta dana yang dibutuhkan.
- c. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kabupaten Tabanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Tabanan Tahun 2026 sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappeda tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu, dan realisasi Renstra Bappeda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappeda dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Renja dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Renja, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Tabanan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp. 11.128.260.050,00 (Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Puluh rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.445.712.323,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar **84.88%**.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program pada Bappeda disajikan dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tabel II.1) dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
5				Perencanaan									
5	01			Bappeda									
5	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten/Ko ta	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	100%	75.63%	100%	90,83%	90.83	100%	256.4%	256.4%
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	9 dokumen	100%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bappeda Tabanan)	100%	73.87%	100%	91,37%	91.37	100%	258.76%	258.76%
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	100%	83.93%	100%	76,13%	76.13	100%	241.1%	241.1%
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	2 Jenis Barang	2 Jenis Barang	3 Jenis Barang	3 Jenis barang	3 Jenis Barang	2 Jenis Barang	7 Jenis Barang	100%
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	100%	82.16%	100%	90,17%	90.17	100%	259.43%	259.43%
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	6 Jenis Barang	6 Jenis Barang	6 Jenis Barang	6 Jenis barang	6 Jenis Barang	6 Jenis Barang	18 Jenis Barang	100%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	02		Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunandaer ah	Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	90%	66.42%	90%	71,92%	79.91	90%	194.07%	292.18%
5	01	02	2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	100%	70.31%	90%	68,04%	75.6	90%	207.03%	%
5	01	02	2.03	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	100%	58.20%	90%	82,03%	91.14	100%	172.2%	172.2%
5	01	03		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	90%	76.71%	90%	57,74%	64.15	90%	201.26%	223.6%
5	01	03	2.01	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan	90%	81.52%	90%	75,56%	83.95	90%	222.24%	246.2%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				manusia	realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah								
5	01	03	2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	90%	70.85%	90%	53,48%	59.38	90%	190.43%	211.58%
5	01	03	2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah	90%	78.54%	90%	94,02%	104.46	90%	253.33%	281.47%
5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan daerah	persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	90%	0	0	0	0	0	0	0

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	1 Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0
5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan	persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	1 Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	1 Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	-	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 Merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 31 Desember Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra 2021-2026. Pada Tahun 2024 terdapat 3 (Tiga) program dan 11 (Sebelas) Kegiatan yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten/Kota dengan indikator Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan) yaitu terealisasi sebesar 90,83% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Hal ini disebabkan akibat target kegiatan pada Pelaksanaan:

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (BappedaTabanan) terealisasi 74.74% dari target 100%
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bappeda Tabanan) yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 84.89%.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan) yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi 57.17%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancarantugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan), terealisasi 97,52% dari target 100%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indicator Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan) yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi 90.17%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancarantugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan, target 100%

teralisasi 90.33%

2. Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD yaitu terealisasi sebesar 71.92% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Hal ini disebabkan akibat target kegiatan pada pelaksanaan:

- Penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan indikator Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD yang ditargetkan 90% terealisasi 68.04%
- Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD yang ditargetkan 90% terealisasi 82.03%

3. Program Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah yaitu terealisasi 57,74% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini disebabkan akibat target kegiatan pada pelaksanaan:

- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan indikator Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah yang ditargetkan 90% terealisasi 75.56%
- Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA dengan indikator Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan perencanaan pembangunan daerah yang ditargetkan 90% terealisasi 53.48%

Sedangkan untuk Target dan Realisasi Kinerja Program bidang ekonomi dan pembangunan dengan indikator persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah Tahun 2024 Hanya berisi Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 berdasarkan Renstra Bapelitbang (Bappeda) Tahun 2021-2026, namun mengacu Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka bidang penelitian tidak lagi menjadi target urusan Bappeda.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Bappeda Bapelitbang Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Dalam penyelenggaraan Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan, antara lain:

- a) Pada beberapa kegiatan terjadi keterlambatan proses administrasi keuangan sehingga ini berpengaruh terhadap capaian target program di bulan ataupun triwulan berjalan, hal ini disebabkan adanya PPTK melaksanakan tugas belum optimal mengacu pada aliran Kas yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b) Tim Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum melakukan monev secara maksimal, mengakibatkan realisasi anggaran SKPD tidak dapat dijadikan bahan evaluasi dengan optimal

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah:

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan IV, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan masuk dalam kategori baik, begitu pula dengan penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Tabanan telah mencapai 84.88%. Oleh karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah adalah tercapainya target kinerja pada triwulan III dan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk dapat mencapai target capaian pada triwulan berikutnya.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Bappeda Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan, ditinjau dari cakupan bidang tugas dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang disyaratkan.

Keberadaan Sekretariat (Bagian Umum dan bagian Keuangan), Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi yang mendukung fungsi-fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan. Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal Kabupaten Tabanan masih terdapat Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong bagi Bappeda Kabupaten Tabanan. Faktor penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional perencana;
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan antra SKPD dan sistem koordinasi belum terintegrasi secara online;
3. Masih rendah akurasi data perencanaan karena kompleksitas data perencanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan;
4. Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim;
5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

lintas sektordan lintas SKPD yang masih lemah;

6. Terbatasnya Profesionalitas SDM dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tabanan.

Sedangkan faktor pendorong Bappeda Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk periode Renstra tahun 2025-2029, antara lain:

1. Tersedianya anggaran untuk bimbingan dan pelatihan perencana;
2. Tersedianya perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung peningkatan kinerja
3. Melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan.
5. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan di Kabupaten Tabanan
6. Usaha untuk melakukan efisiensi waktu proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap SKPD di Kabupaten Tabanan melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Bappeda adalah satu Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur perencana dan pengendalian pembangunan pemerintah daerah. Pada Peraturan Bupati Tabanan Peraturan Daerah Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas Bappeda diuraikan lebih jelas yang mencakup merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Bappeda tidak hanya bertanggungjawab pelaksanaan perencanaan dalam instansinya sendiri namun juga seyogyanya membina,

mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan di OPD.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten Tabanan oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Bappeda sebagai koordinator dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)/standar nasional. Penentuan kinerja pelayanan pada Bappeda menggunakan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang dimiliki.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan

NO	Kinerja Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator	Realisasi Capaian Tahun ke				Target Renstra PD Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke -				Keterangan
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	95%	79%	91%	83.8%	71.92%	95%	83.2%	95,8%	92.4%	75.70%	Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026
2	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%	81%	75.5%	77.8%	67.55%	90%	90%	83,9%	86,4%	75.05%	Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026
3	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	95%	80%	88.9%	-	-	-	84,2%	93,6%	-	-	Berdasarkan Perbup 104 Tahun 2022 ttg. SOTK, Kelitbangan menjadi BRIDA
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	66.15%	67,55%	72,45	90.83%	100%	66,15%	67,55%	72,45%	90.83%	Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dengan RKPD);
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (*e-planning*) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (*e-data*, *ebudgeting*, *e-monev* dan *e-reporting*) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 86 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Tabanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan Pembangunan Daerah.

Pencapaian pembangunan akan sangat dipengaruhi penetapan rencana yang dapat mengalokasikan sumberdaya dengan baik. Meskipun seluruh dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh perundangan dan peraturan yang berlaku telah dapat disusun namun ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja daerah yang masif dan efisien serta update khususnya data statistik sektoral sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Belum terjaminnya keselarasan perencanaan kabupaten dengan perencanaan desa.
3. Belum optimalnya fungsional perencanaan sebagai penggerak perencanaan yang konsisten.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global yang

bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan, serta tata kelola yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai bentuk kesungguhan pemerintah terhadap komitmen global tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya maksimal dalam menggalang partisipasi seluruh stakeholder pembangunan untuk ikut berkolaborasi dalam pencapaian tujuan dan target pembangunan berkelanjutan tersebut. Berikut gambaran singkat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dipandang relevan dengan karakteristik wilayah dan sosial Kabupaten Tabanan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

OPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Bappeda	74 (BB)	10.737.469.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten /Kota	Bappeda	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Bappeda	74 (BB)	10,073,402,100.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi	3 Dokumen	10.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkatdaerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi	3 Dokumen	5,000,000.00	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,000,000.00	
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	8.754.469.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	8,748,969,000.00	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	8.749.469.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	8,746,469,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Dokumen	2,500,000.00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	401.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	266,968,000.00	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 jenis barang	40.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 jenis barang	15,000,000.00	
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 jenis barang	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 jenis barang	16,000,000.00	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 jenis barang	60.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 jenis barang	30,000,000.00	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 jenis barang	40.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 jenis barang	15,000,000.00	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	0.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Undangan yang Disediakan			
-	Penyediaan Bahan/Material	Bappeda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 jenis barang	45.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Bappeda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 jenis barang	35,000,000.00	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	160.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	150,968,000.00	
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Jumlah jenis barang kantor yang terpenuhi kebutuhannya	5 Jenis barang	350.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Jumlah jenis barang kantor yang terpenuhi kebutuhannya	5 Jenis barang	350,000,000.00	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis Barang	350.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis Barang	350,000,000.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Jumlah jenis jasa kantor yang terpenuhi kebutuhannya	2 jenis Barang	456.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Jumlah jenis jasa kantor yang terpenuhi kebutuhannya	2 Jenis Barang	436,465,100.00	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5,000,000.00	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	146,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	285,465,100.00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Pemeliharaan barang Dinas, Pajak Perizinan dan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	766.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Pemeliharaan barang Dinas, Pajak Perizinan dan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	266,000,000.00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	206.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	206,000,000.00	
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Jenis barang	60.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 jenis barang	60,000,000.00	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis barang	500.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 jenis barang	0.00	
II	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	1.480.862.500,00	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Bappeda	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	781,470,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	1.080.862.500,00	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	646,103,000.00	
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	1.080.862.500,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	646,103,000.00	
2	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	400.000.000,00	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	135,367,000.00	
-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Dokumen	400.000.000,00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Dokumen	135,367,000.00	
III	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	90%	2.700.000.000,00	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	90%	1,900,000,000.00	
1	Koordinasi	Bappeda	Jumlah Dokumen	2	900.000.000,00	Koordinasi	Bappeda	Jumlah	2	600,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	500.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	350,000,000.00	
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	400.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	250,000,000.00	
2	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	2 Dokumen	1.400.000.000,00	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang	2 Dokumen	1,150,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1,100,000,000.00	
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50,000,000.00	
3	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	400.000.000,00	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	150,000,000.00	
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	75,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir			
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	75,000,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Rencana Kerja tahun 2026 penginputan usulan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang akan di fokuskan untuk memastikan bahwa pendekatan perencanaan politik, teknokratik, *top down dan bottom up*, dapat berjalan dengan adil (*fair*).

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada di tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat dan LSM. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel II.3
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan

No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Tabanan	Kabupaten Tabanan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Bappeda	A	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi	3 Dokumen	-

No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	-
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah jenis barang kantor yang terpenuhi kebutuhannya	5 Jenis Barang	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah jenis jasa kantor yang terpenuhi kebutuhannya	2 jenis barang	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Pemeliharaan barang Dinas, Pajak Perizinan dan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	-
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	-
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	-
	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	-
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	2 Dokumen	-

No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			RKPD)		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	-

BAB III

TUJUAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) telah menentukan tema pembangunan tahun 2026 yaitu **“Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Visi ini diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang berfokus pada: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, Berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2025-2029 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Emas,” RPJMN 2025-2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, melalui dokumen Asta Cita mengungkapkan delapan buah misi Presiden Republik Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya, yaitu keberlanjutan hilirisasi hingga swasembada pangan. 8 Program Asta Cita tersebut diantaranya:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda beserta indikatornya disajikan dalam tabel III.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana 2025-2029 dan sesuai dengan Rencana Strategis, Bappeda Kabupaten Tabanan mempunyai 1 (satu) tujuan, dan 1 (Satu) sasaran, yang mana masing-masing sasaran memiliki indikator keberhasilan yang berbeda-beda sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.

Tabel III.1
Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target 2026
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Dokumen Perencanaan Yang Handal	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perangkat Daerah membantu Bupati dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2026 disampaikan secara rinci pada Tabel III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				10.619.975.600,00				15.159.218.225,00
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				10.619.975.600,00				15.159.218.225,00
5	01				Perencanaan				10.619.975.600,00				15.159.218.225,00
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8.622.760.000,00			100%	10.978.355.725,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	3 dokumen	5.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3 Dokumen	10.250.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 bulan	7.664.383.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	8.973.330.725,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Bulan	222.418.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		12 Bulan	422.775.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Jenis Barang	96.726.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		2 Jenis Barang	350.000.000,00
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	3 Jenis Jasa	440.465.100,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3 Jenis barang	456.000.000,00
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Dinas, Pajak Perizinan dan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	100%	193.767.400,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		100%	766.000.000,00
5 01 02	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD/Renstra	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	100%	781.470.000,00			100%	1.480.862.500,00
5 01 02 2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Dokumen	646.103.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		2 Dokumen	1.080.862.500,00
5 01 02 2.03	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	4 laporan	200.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		4 Laporan	400.000.000,00
5 01 03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	100%	1.900.000.000,00			100%	2.700.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01		Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Dokumen	201.112.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		2 Dokumen	900.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Dokumen	650.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		2 Dokumen	1.400.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Tabanan, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Dokumen	300.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		2 Dokumen	400.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Rencana Kerja

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Bappeda untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2025 disampaikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten
Tabanan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan TH 2026	
			Target	(Rp)
1	2	3	4	5
	BAPPEDA			10.619.975.600,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			10.619.975.600,00
	Perencanaan			10.619.975.600,00
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda	100%	8.622.760.000,00
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.000.000,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.664.383.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan TH 2026	
			Target	(Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	7.661.383.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.000.000,00
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	222.418.500,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.000,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.999.600,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.001.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	36.000.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.418.000,00
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Kantor	2 Jenis Barang	96.726.000,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	96.726.000,00
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	3 Jenis Jasa	440.465.100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.465.100,00
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak Perizinan dan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	193.767.400,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan TH 2026	
			Target	(Rp)
1	2	3	4	5
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	133.997.400,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	59.770.000,00
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
II	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD/RENSTRA	100 %	846.103.000,00
II.1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	646.103.000,00
	1 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	646.103.000,00
II.2	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	200.000.000,00
	1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	200.000.000,00
III	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	1.151.112.600,00
III.1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	201.112.600,00
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	95.264.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan TH 2026	
			Target	(Rp)
1	2	3	4	5
	2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD))	1 Dokumen	105.848.600,00
III.2	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	650.000.000,00
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	600.000.000,00
	2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50.000.000,00
III.3	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000,00
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	75.000.000,00
	2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	225.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabanan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2026, jika menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai tujuan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Tabanan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan akan disesuaikan dengan ketersediaan dana sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tabanan,

I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos.,M.Si.,CGCAE

